**PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA PELARIAN
(Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)**

Riky Novarizal, M.Krim & Herman, M.Si

ABSTRACT

This study aims to explain how the correctional institutions strategies in preventing the flight of the inmates and physical security of Pekanbaru Class IIA Penitentiary. From these physical conditions it has an impact on the implementation of safeguards in preventing various disturbances in order, especially in preventing the escape of prisoners. The method used to conduct this research is a qualitative approach with descriptive design whose data is obtained through the process of interviews and field observations. Key informant in this study was KPLP (head of security for prison). While the informants in this study were guardians and security sections. This study then concluded that there was still something to be done to improve, both physically and human resources so that the realization of an effective security pattern.

Key words :*Prison Security, Physical Security Design, Prison Break Out*

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai penjara yaitu sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan sebelum di kembalikan ke dalam masyarakat untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan

di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization / PPO*)

dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lapas tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan lapas dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi *input* terlebih dahulu (Atang,2002:21).

Lapas merupakan institusi pemerintah yang rentan terhadap berbagai pelanggaran, baik yang bersifat kelembagaan ataupun individual. Berita dimedia massa berulang kali mengangkat cerita buruk lapas, dari beragam kekerasan di dalamnya, sampai tuduhan bahwa lapas merupakan sarang penyimpanan dan peredaran narkoba “paling aman” dibanding tempat diluar. Fakta membuktikan, bahwa banyak kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Bagi terpidana, lembaga pemasyarakatan (kemudian disebut sebagai lapas) sebagai institusi reintegrasi sosial seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di kemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sediakala sebelum mereka

melakukan kesalahan yang menyebabkan masuk penjara. Ini selaras dalam apa yang termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, ”sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu Antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat”. Dinyatakan bahwa tujuan

pembinaan adalah untuk mencegah terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran dalam kultur penjara) yang justru dapat membuat kondisi seseorang (warga binaan) lebih buruk dari pada sebelum ia masuk kedalam lapas. Untuk menunjang pembinaan tersebut, tentunya dibutuhkan suasana yang kondusif dalam lembaga pemasyarakatan.

Untuk menciptakan suasana kondusif ini, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas, maka kegiatan pembinaan ini akan terganggu. Dalam konteks Lapas dan Rutan, pemeliharaan keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam lingkungan lembaga dan para penghuninya agar tidak terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Oleh sebab itu, aspek keamanan bukan hanya menjadi prasyarat utama dalam pembinaan narapidana, melainkan juga dalam sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, masalahnya ketika rasa aman mengalami ketidaknyamanan, maka akan berpengaruh terhadap pola pembinaan yang telah dibuat dan dijadwalkan. Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman terhadap

pembinaan dan kelangsungan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pembinaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain, lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Table 1.1 Data Jumlah Kasus Pelarian Narapidana Di Lapa Kelas IIA Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah WB
1	2015	-	-
2	2016	-	-
3	2017	1 Kasus	2 Orang

Sumber: Lapa Kls IIA Pekanbaru

Untuk melaksanakan pembinaan selain keamanan, dibutuhkan keadaan yang kondusif. Namun pada kenyataannya, Lapa di Indonesia memiliki banyak masalah, salah satu masalahnya berada pada manajemen dari Lapa itu sendiri. Buruknya manajemen Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi.

Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapatkan kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Pelarian tahanan dan narapidana merupakan permasalahan dalam proses pemasyarakatan. Peristiwa pelarian terjadi berbagai alasan, seperti yang

terungkap dalam beberapa pemberitaan media, yakni pelarian dilakukan narapidana dengan memanfaatkan

Kondisi kekosongan petugas pada menara pos penjagaan (warga binaan kabur akibat petugas lapa minim). Pelarian narapidana lainnya juga terjadi pada narapidana yang sedang menjalani proses asimilasi. Proses pelarian diri merupakan suatu alternatif tindakan yang dilakukan oleh para narapidana untuk menghindari kewajiban menjalani masa pidana penjara. Kasus pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan yang terjadi di Indonesia menggunakan banyak modus, mulai dari perusakan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan hingga pemanfaatan kesempatan ketika petugas lengah melakukan pengawasan. Dari sejumlah kasus pelarian yang ada memberikan gambaran bahwa orang yang sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau dalam pengawasan

Pelarian yang dilakukan narapidana atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu fenomena yang jarang terjadi. Contohnya saja kasus pelarian yang dilakukan narapidana yang ada di lembaga

pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu. Sementara lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi pelaku kejahatan sebelum dikembalikan ke dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu strategi lembaga pemasyarakatan dalam mencegah larinya warga binaan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi lembaga pemasyarakatan dalam mencegah larinya warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru

Kerangka Teori

Menurut Ronald V. Clarke (Kemal, 2013:137) adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori *situational crime prevention* sebagai strategi pencegahan kejahatan yang ditunjukkan untuk suatu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan. Dalam hal strategi pencegahan kejahatan, teknik

pencegahan kejahatan yang meliputi (Clarke,1997;51). *Situational crime prevention* pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum:

1. Membuat desain keamanan
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan (Clarke & Newman, 2005).

Pencegahan kejahatan berbeda dengan pengendalian kejahatan. Pengendalian kejahatan berkaitan dengan pemeliharaan jumlah prilaku yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Sedangkan pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang jauh. (Lab,2013:31).

Dalam perkembangannya terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara

sosial (*social crime prevention*). Pendekatan situasional (*situational crime prevention*). Dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas atau masyarakat (*community based crime prevention*).

- a. *Social Crime Prevention* yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada akar masalah dari kejahatan, terutama faktor-faktor yang berkontribusi pada penyimpangan. Pendekatan *social crime prevention* berfokus pada pengembangan program dan kebijakan meningkatkan taraf kegiatan lingkungan dari orang yang berpotensi melakukan kejahatan.
- b. *Situational Crime prevention* yaitu pencegahan kejahatan yang berfokus untuk mengurangi kesempatan kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko bagi pelaku yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan.
- c. *Community Based Crime prevention* yaitu pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara memberdayakan kelompok atau komunitas dalam masyarakat untuk proaktif bersama dengan lembaga pemerintah dalam mengatasi

permasalahan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2008:17) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang permasalahan untuk mendapat data-data kemudian menganalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif bermaksud membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Hal ini sesuai yang dirumuskan oleh Nizar (1988:63) yang mengatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah metode dalam penelitian suatu kelompok, sebuah objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif,

kata deskriptif berasal dari Bahasa Inggris, *descriptive* yaitu berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Menggambarkan melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau penelitian menjelaskan hasil-hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata.

Hasil Dan Pembahasan

Menurut Steven P. Lab strategi pencegahan kejahatan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh (2013 :31).

Kemudian berdasarkan perkembangannya pencegahan kejahatan di bagi menjadi 3 bagian yaitu pencegahan sosial crime prevention, situasional crime prevention dan pencegahan berdasarkan komunitas atau masyarakat.

1. *Sosial Crime Prevention* yaitu pencegahan yang dilakukan

dengan mencari akar masalah dari kejahatan tersebut terutama mencari faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan itu terjadi.

2. *Situasional Prevention* yaitu pencegahan kejahatan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan caramemperketat penjagaan, memasang CCTV ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
3. Pencegahan berdasarkan komunitas dan masyarakat yaitu dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pos ronda, kamtibmas yang ada diwilayah-wilayah tersebut.

Pola Pengamanan

Menurut informasi yang di peroleh dari dua sumber berbeda, ada dua rencana pola pengamanan yang digunakan di lapas kelas II A

pekanbaru. Dari KPLP mengatakan bahwa rencana pola pengamanan semula yang akan digunakan di lapas ini adalah *maximum security*.

“disinikan perbandingan jumlah petugas dengan narapidana sangat jauh berbeda,,maka dari itu kami lebih memaksimalkan penjagaan dengan dibantu oleh kamera cctv yang berada di sekeliling lapas dan kami pun merasa sangat terbantu dengan adanya nya kamera cctv karna dapat mempermudah kami untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan dan cctv ini dipantau 24 jam.(wawancara dilakukan tanggal 16 november 2018).

Sedangkan menurut kasubsi peltatib mengatakan bahwa pola pengamanan disesuaikan dengan tempat. Misalnya blok hunian dikategorikan dengan pola pengamanan *maximum security*, diluar blok hunian namun masih berada di dalam tembok pengamanan di kategorikan *medium security* dan jika di luar

tembok pengamanan sudah menggunakan pola pengamanan *minimum security*.

“dia gak bisa kita kategorikan maksimum dia disini, pokoknya kita terapkan pengamanan, daerah mana dia maksimum daerah mana dia medium dan minium, kalau di pengamanan kan begitu. Kita batasilah dia pengamanannya, blok sana dia maksimum, keluar kesini medium,sampe disitu udah minimum diluar.(wawancara dilakukan tanggal 16 november 2018).

Penjelasan dari KPLP selaku ketua pengamanan lembaga pemasyarakatan bahwa pengamanan yang dilakukan di pintu utama lembaga pemasyarakatan di jaga oleh petugas jaga sebanyak 3 orang setiap harinya.

“petugas yang menjaga di pintu utama lapas itu sebanyak 3 orang setiap harinya dan pintu utama itu selalu di kunci dan kunci nya di pegang oleh petugas jaga..dan cctv yang ada di lapas ini selalu di pantau setiap harinya. Walaupun sudah ada petugas-petugas khusus keamanan namun para pegawai lapas wajib ikut bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban lapas.(wawancara dilakukan tanggal 15 november 2018).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengamana, para petugas khususnya petugas pengamanan dilengkapi dengan sarana penunjang keamanan tersebut. Sarana penunjang pengamanan bisa berupa manual maupun elektronik

Dan KPLP menjelaskan bahwa setiap pengunjung yang ingin membesuk narapidana atau warga binaan diharuskan memakai stempel yang di berikan oleh petugas pengamanan yang berada di pintu utama sebelum masuk kedalam lapas.

“ya...setiap pengunjung yang ingin membesuk keluarga yang ada dilapas harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan diberi stempel ditangan pengunjung stempel itu hanya bisa dilihat dengan menggunakan laser . apabila pengunjung tidak memakai stempel tersebut dilarang masuk ke lapas”.(wawancara dilakukan tanggal 15 november 2018).

Hal yang serupa dijelaskan oleh kalapas dan petugas penjagaan yang ada pada saat peneliti melakukan penelitian di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

“kemaren memang di lapas ini petugas nya masih kurang habis tu sarana dan prasarana nya belum begitu dapat menunjang keamanan disini maka nya kami kemaren kecolongan karna kemaren pemeriksaan masih dilakukan secara manual belum ada misin x-rey dan mesin metal detector ,untuk mendeteksi barang2 berjenis logam dan lainnya yang dibawa oleh pengunjung,,dengan adanya nya alat itu kami pihak lapas terkhusus petugas keamanan merasa terbantu dengan ada nya alat tersebut.”(wawancara dilakukan tanggal 20 november 2018).

Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan strategi-strategi yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru dalam mencegah larinya warga binaan sebagai berikut :

1. Berupaya untuk memenuhi kelengkapan fasilitas sarana pengamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru dalam mencegah terjadinya kasus pelarian warga binaan dengan

berbagai macam modus operandi.

2. Berupaya melakukan pengecekan barang-barang bawaan pengunjung sebelum dan sesudah memasuki lembaga pemasyarakatan.
3. Berupaya menambah Jumlah petugas pengamanan yang belum sebanding dengan luas bangunan dan penghuni yang harus diamankan setiap harinya.
4. Berupaya memberikan pemahaman dalam diri petugas, khususnya petugas pengamanan terhadap tugas dan fungsinya sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian yang penulis lakukan tentang strategi lembaga pemasyarakatan dalam mencagah larinya warga

binaan di lapas kelas IIA pekanbaru yaitu

1. Menyusun standarisasi rasio perbandingan jumlah petugas dengan penghuni (warga binaan) yang dilakukan oleh Kemenkumham . Setidaknya di setiap pos penjagaan terdapat petugas yang melaksanakan pengamanan.
2. Melakukan pengecekan rutin yang dilakukan pihak lapas terhadap sarana dan prasarana yang ada di lapas
3. Penyediaan sarana pengamanan dan penambahan lapisan pintu di P2U dengan tujuan menjaga keamanan petugas P2U dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan dari luar lapas.
4. Memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pengamanan yang mengalami kerusakan seperti CCTV , pintu dan sebagainya.

Daftar Pustaka

Buku :

Absussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. *Kriminology*, Cetakan ketiga, Jakarta, PTIK

Ari Astuti, Citizenship, Volume 1, Nomor 1, 2011. *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*

Borodzics, Edward P. 2005. *Risk, Crisis and Security Management*. England : Jhon Wiley & Sons, Ltd

C.Djisman Samosir. 2012. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Cetak pertama, Bandung: Nuansa Aulia

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*

Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Universitas Terbuka.

Dermawan, Moh. Kemal. 2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP-UI

DiPradja, Achmad S. Soema. Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandung : Percetakan Ekonomi

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi Pemasyarakatan*. Bandung : CV Armico

Hendra Fitrianto, Equilibrium pendidikan sosiologi, Volume III, Nomor 2. 2016. *Pola Pemberdayaan Narapidana*

Jurnal:

Masdiana, Erlangga. 2006.
*Kejahatan Dalam Wajah
Pembangunan*, cetakan
pertama, Jakarta selatan

McCrie, Robert D. 2007. *Security
Opertions
Management*. Butterwort
h Heinemann

Moeljatno.2009. *Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*,
Cetakan Kedua Puluh
Delapan, Jakarta, Bumi
Aksara

Moeljatno.2009. *Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*,
Cetakan Kedua Puluh
Delapan, Jakarta, Bumi
Aksara

Muljono, Wahyu.2012.*Pengantar
Teori
Kriminologi*,Yustisia,Yo
gyakarta

Mustofa, Muhammad. 2007.
*Metode Penelitian
Kriminologi*, Edisi
Kedua, FISIP UI
PRESS.

_____. 2007. *Kriminologi*,
Edisi Pertama, FISIP UI
PRESS.

Peraturan Menteri Nomor
M.01.PL.01.01 Tahun
2003

Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan
Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan

Perundang- undangan

Priyatno, Dwijda. 2006. *Sistem
Pelaksanaan Pidana
Penjara Di Indonesia*,
cetakan pertama,
Bandung :PT Refika
Aditama

Rahardjo, Priyatno, 2001. *Pidana
Penjara di Indonesia*.
Jakarta : Yayasan Obor

Runturambi, Simon dan Dadang.
2013. *Manajemen
Sekuriti*, UI- PRESS

- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Pres Bandung. Bandung, R&D, Alfabet.
- Simon R, A. Josias. 2012. *Budaya Penjara : Pemahaman Dan Implementasi*, karya putra darwati, Bandung. Ulang Mangun Sosiawano, Volume 17, Nomor 3, 2017. *Upaya Penanggulangan Kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Sudiadi, Dadang dan Simon Runturambi. 2011. *Pengantar Manajemen Sekuriti*. Depok : PT Galaxy Puspa Mega. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan* Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan